

**IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEWENANGAN
PERIZINAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN
PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI LAMPUNG
(STUDI KASUS KOTA BANDAR LAMPUNG)**



TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2 pada
Program Studi Magister Ilmu Lingkungan**

**HENDRI MICKY
300002135410030**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016**

TESIS

**IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEWENANGAN
PERIZINAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN
PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI LAMPUNG
(STUDI KASUS KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Disusun oleh

HENDRI MICKY
30000215410030

Mengetahui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. Hartuti Purnaweni, MPA

Dr. Kismartini, M.Si

Menyetujui,

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Diponegoro

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Lingkungan

Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA
NIP. 19611228 198603 1 004

Dr. Hadiyanto, S.T., M.Sc
NIP. 19751028 199903 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG (STUDI KASUS KOTA BANDAR LAMPUNG)

Disusun oleh

HENDRI MICKY
30000215410030

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 17 Oktober 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Ketua :

Tanda tangan

Dr. Hermawan, DEA

.....

Anggota :

1. Dr. Hartuti Purnaweni, MPA

.....

2. Dr. Kismartini, M.Si

.....

3. Dr. Ir. Syafrudin, CES, MS

.....

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun dengan judul “Implementasi Perubahan Kewenangan Perizinan Dan Pengawasan Pertambangan Pada Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Lampung (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Studi Magister Ilmu Lingkungan seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, Oktober 2016

Hendri Micky
30000215410030

RIWAYAT HIDUP



Hendri Micky. Lahir di Metro (Lampung) 14 November 1985, merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak H. M. David, AT dan Ibu Hj. Asnawati R.BA

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Pertiwi Teladan Metro, sekolah menengah tingkat pertama di SMP Negeri 2 Metro, dan sekolah menengah atas di SMU Negeri 1 Metro. Pada tahun 2009 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Teknik Jurusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Pada tahun 2011 mulai bekerja di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung. Pada tahun 2015 penulis mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan jenjang S2 pada Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro dengan bidang konsentrasi Perencanaan Lingkungan melalui Program Beasiswa dari Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana – Bappenas (Pusbindiklatren-Bappenas).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul **“Implementasi Perubahan Kewenangan Perizinan Dan Pengawasan Pertambangan Pada Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Lampung (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)”** ini. Tesis ini merupakan sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-2 pada Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan terselesaikannya penulisan tesis ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Dr. Hartuti Purnaweni, MPA dan Dr.Kismartini, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan tesis.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro;
2. Dr. Hadiyanto, M.Sc selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan serta seluruh staf administrasi atas segala bantuan dan dukungannya;
3. Dr. Hermawan, DEA dan Dr. Syafrudin, CES, MS selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk perbaikan penyusunan tesis;
4. Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Dinas Pertambangan dan Eenergi Provinsi Lampung yang telah memberikan kesempatan penelitian dan ijin tugas belajar kepada penulis;
5. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren – Bappenas) yang telah memberikan beasiswa dan kesempatan untuk belajar;
6. Semua narasumber atas kerjasamanya dalam penelitian ini;
7. Istriku tercinta dr. Tanti Arianti, Ibu dan inspirasiku Hj. Asnawati, Papa, cahayaku Athayya Kynan Hendri, seluruh keluarga besar Metro, Dayamurni, dan Bogor atas doa, tangis dan semangat yang tiada henti;

8. Seluruh sahabat seperjuangan MIL-45 Bappenas atas segala kenangan, pembelajaran, dan kerjasamanya.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, Oktober 2016

Hendri Micky
30000215410030

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Penelitian Terdahulu	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Pengelolaan Lingkungan.....	12
2.1.1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	12
2.1.2. Manajemen Lingkungan	14
2.1.3. Kebijakan Lingkungan	15
2.2. Pertambangan Berkelanjutan	16
2.2.1. Pembangunan Berkelanjutan	16
2.2.2. Industri Pertambangan Berkelanjutan	17
2.3. Pengelolaan Kegiatan Pertambangan.....	19
2.3.1. Pembagian Kewenangan Sebelum Terbit UU23/2014.....	21
2.3.2. Pembagian Kewenangan Pasca Terbit UU23/2014.....	22
2.3.3. Metode Penambangan	24
2.3.4. Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (<i>Good Mining Practices</i>) ..	25
2.3.5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	26
2.3.6. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	26
2.3.7. Konservasi Pertambangan	27

2.3.8. Keselamatan Pertambangan.....	28
2.4. Implementasi Kebijakan Publik.....	28
2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik	29
2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik.....	29
2.1.3. Model Implementasi George Edwards III	32
BAB III. METODE PENELITIAN	35
3.1. Pendekatan Penelitian	35
3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
3.3. Fokus Penelitian.....	36
3.4. Fenomena dan Dimensi Penelitian.....	36
3.5. Kriteria Informan	39
3.6. Teknik Pengumpulan Data	40
3.7. Analisis Data	41
3.6.1. Tahapan Implementasi, Faktor Pendorong/Penghambat Implementasi	41
3.6.2. Strategi Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan	42
3.8. Kriteria Keabsahan Data	44
3.9. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	46
BAB IV.HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
4.1.1. Profil Kota Bandar Lampung	47
4.1.2. Profil Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.....	48
4.1.3. Profil BPPLH Kota Bandar Lampung.....	52
4.2. Implementasi Perubahan Kebijakan	54
4.2.1. Kondisi pengelolaan pertambangan sebelum UU 23/2014	54
4.2.2. Proses atau Rangkaian Tindakan Pelaksanaan Kebijakan.....	59
4.2.3. Kondisi Kebijakan Perizinan dan Pengawasan saat ini (<i>existing</i>)	73
4.2.4. Kajian kegiatan pertambangan terhadap pengelolaan pertambangan berkelanjutan	83
4.3. Faktor Pendukung atau Penghambat Kebijakan terhadap pengelolaan pertambangan berkelanjutan	96
4.4. Strategi Pertambangan Berkelanjutan.....	107
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	118
5.1. Kesimpulan	118
5.2. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2.1 Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan.....	22
Tabel 3.1 Fenomena dan Dimensi Penelitian.....	38
Tabel 3.2 Matrik IFAS/EFAS	43
Tabel 3.3 Matrik SWOT	43
Tabel 4.1 Daftar IUP Kota Bandar Lampung	54
Tabel 4.2 Daftar P3D yang dialihkan.....	63
Tabel 4.3 Rekapitulasi PNS yang akan dialihkan	70
Tabel 4.4 Daftar Pegawai Seksi Pengusahaan Pertambangan	73
Tabel 4.5 Daftar IUP yang dicabut Pemprov Lampung.....	77
Tabel 4.6 Daftar Pegawai Seksi Pembinaan Pertambangan.....	79
Tabel 4.7 Daftar lokasi PETI	81
Tabel 4.8 Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal	109
Tabel 4.9 Matrik IFAS	110
Tabel 4.10 Matrik EFAS	110
Tabel 4.11 Matrik analisis SWOT	111

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Penerimaan Negara Sektor ESDM.....	1
Gambar 2.1 Elemen Pembangunan Berkelanjutan.....	17
Gambar 2.2 Pilar Pertambangan Berkelanjutan.....	18
Gambar 2.3 Model Implementasi Edward III.....	33
Gambar 3.1 Matrik Grand Strategy.....	44
Gambar 3.2 Diagram Kerangka Pikir Penelitian.....	46
Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung.....	49
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Distamben.....	52
Gambar 4.3 Struktur Organisasi BPPLH.....	53
Gambar 4.4 Peta WIUP CV. Sari Karya.....	55
Gambar 4.5 Peta rencana Blok Penambangan.....	56
Gambar 4.6 Progres Penataan IUP.....	57
Gambar 4.7 Kegiatan Verifikasi Dokumen.....	68
Gambar 4.8 Timeframe peralihan P3d ke ESDM.....	69
Gambar 4.9 Diagram Alir Pengajuan WIUP.....	72
Gambar 4.10 Daftar IUP yang diterbitkan Pemprov Lampung.....	74
Gambar 4.11 Tingkat pelaporan kegiatan pengelolaan lingkungan.....	77
Gambar 4.12 Kegiatan PETI.....	80
Gambar 4.13 Alur Komunikasi.....	84
Gambar 4.14 Kondisi Ruangan Bidang PU.....	88
Gambar 4.15 Penggunaan APD dan APAR.....	95
Gambar 4.16 Data Kecelakaan Tambang.....	96
Gambar 4.17 Kegiatan Pengangkutan Bahan Galian.....	97
Gambar 4.18 Areal Reklamasi.....	99
Gambar 4.19 Mata Pencaharian Penduduk Rampang Raya.....	101
Gambar 4.20 Jumlah Keluarga Prasejahtera.....	102
Gambar 4.21 Matrik Grand Strategy.....	109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara
Lampiran II Hasil Analisis Data
Lampiran III Dokumentasi Hasil Penelitian
Lampiran IV Data Pendukung

DAFTAR ISTILAH

APBN	Anggaran Penerimaan Belanja Negara
APD	Alat Pelindung Diri
BKPRD	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
BKN	Badan Kepegawaian Negara
BPMPTD	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
BPPLH	Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
BPS	Badan Pusat Statistik
CAIT	Calon Inspektur Tambang
CNC	<i>Clean and Clear</i>
CPI	<i>Competent Person Indonesia</i>
Distamben	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
DJMB	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
EFAS	<i>External Factor Analysis Summary</i>
ESDM	Energi & Sumberdaya Mineral
FS	Studi Kelayakan
IFAS	<i>Internal Factor Analysis Summary</i>
IUP	Izin Usaha Pertambangan
IPR	Izin Pertambangan Rakyat
KTT	Kepala Teknik Tambang
P3D	Pendanaan, Personil, Prasarana & Sarana, Dokumen
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PETI	Penambangan Tanpa Izin
RKAB	Rencana Kerja Anggaran Biaya
RKTTL	Rencana Kerja Teknis Tahunan Lingkungan
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Dinas
WIUP	Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Implementasi Perubahan Kewenangan Perizinan dan Pengawasan Pertambangan Pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)

Hendri Micky¹, Hartuti Purnaweni^{1,2}, Kismartini^{1,2}

¹Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

²Jurusan Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Semarang Indonesia

*e-mail : hendri.micky@gmail.com

ABSTRAK

Penerimaan negara yang didapat dari sektor pertambangan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan memiliki kontribusi mencapai hampir 10 % dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, sektor pertambangan tidak lepas dari dampak negatif terhadap lingkungan dan khususnya kaitannya dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kekuasaan kepada Daerah untuk memaksimalkan pendapatan melalui sektor pertambangan. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi dibebani amanah besar sebagai pengelola kegiatan sektor pertambangan untuk ruang lingkup satu provinsi, yang tentu saja bukan perkara mudah, sehingga menarik untuk dikaji bagaimana implementasi terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan 1) mengkaji implementasi kebijakan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Kota Bandar Lampung 2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan 3) merumuskan strategi untuk mencapai pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan. Untuk menjawab tujuan pada poin (1) dan (2) digunakan metode analisis data Miles dan Huberman, dan untuk menjawab tujuan pada poin (3) digunakan metode analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi kebijakan telah sampai pada kegiatan evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pemrosesan permohonan izin baru. Untuk implementasi kebijakan pengawasan pertambangan menunjukkan hasil yang belum optimal dengan indikasi adanya kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan menurunnya ketaatan pelaporan kegiatan pengelolaan lingkungan pasca kebijakan diberlakukan. 2) Faktor pendukung implementasi kebijakan adalah a) Adanya petunjuk pelaksanaan yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan, b) Pembentukan UPTD yang bertugas membantu fungsi dinas, c) SOP pelayanan perizinan yang melibatkan forum BKPRD Kota. Faktor penghambat implementasi adalah a) Dukungan sumberdaya (Personil, anggaran, fasilitas) yang terbatas, b) Fungsi koordinasi yang lemah, c) Sikap pembiaran *top management* terhadap tidak optimalnya fungsi UPTD, d) Tupoksi UPTD dan Bidang Pertambangan Umum yang tumpang tindih. 3) strategi yang dapat dilakukan adalah ketegasan dari pemerintah untuk memberantas PETI yang sangat merusak lingkungan dan memaksa perusahaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dengan penegakan hukum dan pemberian sanksi tegas bagi pemegang IUP yang tidak memenuhi kewajibannya.

Kata Kunci : Implementasi, Pertambangan Berkelanjutan, Strategi Pengelolaan, SWOT

***The Licensing Authority and The Supervision Mining Policy Implementation by
The Lampung Province Mining And Energy Department
(Case Study of Bandar Lampung City)***

Hendri Micky^{1*}, Hartuti Purnaweni^{1,2}, Kismartini^{1,2}

¹Master of Environmental Science, Post-Graduate School Diponegoro University, Semarang,

²Public Administration Department, Faculty of Social and Political Science Diponegoro University

*e-mail : hendri.micky@gmail.com

ABSTRACT

The State revenue obtained from the mining sector has increased every year and has contributions reaching nearly 10% of the State Budget total. However, the mining sector unavoidable with the negative impacts on the environment and in particular to do with the autonomous region policies which gives the power to the regions to maximize income through mining sector. The Lampung Provincial Mining and Energy Department vested with the great mandate as the mining Manager to the scope of one province, which of course is not easy, so it is interesting to review how the implementation against the policy. This research aims to 1) assess implementation of the policy at the Lampung Provincial Mining and Energy Department in the city of Bandar Lampung 2) identify factors supporting and restricting the policy implementation policy 3) formulating strategies to achieve mining sustainable management. To answer the purpose in points (1) and (2) used Miles and Huberman data analysis methods, and to answer the purpose in points (3) used a SWOT analysis method. The results showed that 1) implementation of the policy have come to the mining permit evaluation activities and a new permit application processing. For the implementation of the supervision policy shows a not optimal results with indication of the emerge of illegal mining and declining observance of environmental management activities reporting post policies enforced. 2) the endowments policy implementation factor was a) the existence of clear guidelines in the implementation of the policy, b) formation of the Technical Implementation Unit (TIU) in charge of helping the Department, c) SOP service licensing involving BKPRD forum. Factors restricting implementation is a) Limited support resources (personnel, budget, facilities) b) feeble coordination Functions, c) top management's attitude issues towards not optimal TIU function d) The overlap of authorities 3) Recommendation strategy is the determination of the government to eradicate illegal mining which extremely damage the environment and forcing the company to meet its obligations under the provisions of legislation, with law enforcement and sanctions expressly for mining permits holders which do not meet their obligations.

Keywords: Sustainable Mining, Management Strategy, SWOT Analysis